

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESEHATAN MELALUI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JKM)
(Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Pati)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**BUNARI
NIM. 2015-02-025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

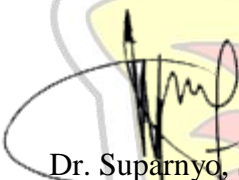
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JKM) (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Pati)

Disusun Oleh :


BUNARI
2015-02-025

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 13 September 2014


Pembimbing Utama,


Dr. Suparno, S.H., M.S


Pembimbing Pendamping


Dr. Sukresno, SH. M.Hum

Anggota Dewan Penguji I


Dr. Subarkah, SH. M.Hum

Anggota Dewan Penguji II


Dr. Dra. Sulistyowati, SH, CN

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal




Hidayatullah, S.H., M.Hum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bunari

N I M : 2015-02-025

Alamat : Implementasi Perlindungan Kesehatan Melalui Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM)
(Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Pati)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, Januari 2018

Yang membuat pernyataan

Materai
6000

Bunari

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas RidhoNya telah berkenan melimpahkan rahmatNya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Tesis yang berjudul “Implementasi Perlindungan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Pati)”. Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk memenuhi gelar Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Dr. Sukresno, SH, M.Hum selaku pembimbing pendamping yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Direktur Rumah Sakit Islam Pati yang telah memberi ijin survey kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus.
5. Dokter dan Staf Rumah Sakit Islam Pati yang telah memberikan data-data sebagai bahan tesis.
6. Semua staff pegawai atau Karyawan Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus

Demikian pula tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan maklum adanya.

Kudus, Januari 2018

Penulis

Bunari

ABSTRACT

The government in the welfare of the community one of them is to provide health insurance through Public Health Insurance, which is the implementation of Law Number 24 Year 2011 on the Social Security Administering Board (BPJS). In the BPJS Act, all citizens or all Indonesian citizens are required to become BPJS members, both BPJS Health and BPJS Employment. The objective of the Government in providing health insurance to the community is very precise, but in the implementation in the field there are still many obstacles or obstacles, one of which is the occurrence of the surge of patients (overload). This happens because of less functioning KDP I less than the maximum.

This type of research is included in the type of descriptive analytical research with empirical juridical approach method to see in full the problem of research sourced from the primary data and secondary data as supporting data. The data were collected by field study (interview) and literature study, the data obtained were analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

The results of research and discussion, it can be seen that the Act BPJS with the aim to realize the implementation of the guarantee of the fulfillment of basic needs of decent living for each Participant and / or family members, as regulated Article 3 of the BPJS Law. BPJS system is the participant BPJS pay dues every month that the number is determined from the membership class members. SOP applied to realize Community Health Protection Through JPK, that is with referral system system, meaning that patients first go to KDP I and if KDP II unable to overcome the patient's illness, then the patient will be referred to PPK II (Hospital), but the patient does not go to KDP I first, but directly to KDP II sehingga Hospital patient overload (patient kelebihan). Efforts Islamic Hospital Pati Implement Health Protection Through JPK.yaitumemikan program health services to the community participant BPJS guided by the Regulation of District Health Office Pati as mentioned above. The regulation regulates the referral system in obstetric and neonatal emergency services, namely Patient Admission at Poned Care Center, Principles of Obstetric and Neonatal EmOC Obstetric Services, Identification of Pregnant Case and Newborn and Screening for Pregnant Women, Maternity Mothers and Postpartum Mothers .

Keywords: *Implemantasi Health Protection and Health Insurance Society (HIS)*

ABSTRAK

Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat salah satunya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU BPJS, semua masyarakat atau semua Warga Negara Indonesia diwajibkan menjadi anggota BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan Pemerintah dalam memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat sudah sangat tepat, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala atau hambatan, salah satunya adalah dengan terjadinya lonjakan pasien (*overload*). Hal ini terjadi karena kurang berfungsinya PPK 1 yang kurang maksimal.

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa UU BPJS dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya, sebagaimana diatur Pasal 3 UU BPJS. Sistem BPJS yaitu peserta BPJS membayar iuran setiap bulan yang jumlahnya ditentukan dari kelas kepesertaan anggota. SOP yang diterapkan untuk mewujudkan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui JPK, yaitu dengan sistem rujukan, artinya pasien terlebih dahulu berobat ke PPK 1 dan apabila PPK I tidak mampu mengatasi penyakit pasien, maka pasien akan dirujuk ke PPK II (Rumah Sakit), namun yang terjadi pasien tidak ke PPK I terlebih dahulu, tetapi langsung ke PPK II sehingga pasien Rumah Sakit *overload* (kelebihan pasien). Kendala-kendala yang muncul dalam mengimplementasikan perlindungan kesehatan melalui Program JPK, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BPJS, kurangnya sosialisasi BPJS dan kurang tegasnya petugas kesehatan.

Kata kunci: Implementasi Perlindungan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)	v
ABSTRAK (DALAM BAHAS INDONESIA)	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
1. Kerangka Konseptual	7
1.1. Kebijakan	7
1.2. Kebijakan Publik	8
1.3. Kebijakan Bidang Kesehatan	9
1.4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	10
1.5. Perlindungan Kesehatan Masyarakat	11
1.6. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat	11

1.7. Kesehatan	13
1.7.1. Pengertian kesehatan	13
1.7.2. Pelayanan Kesehatan	15
1.8. Jaminan Kesehatan	15
2. Kerangka Teoritis	24
2.1. Teori Kebijakan Publik	24
2.2. Tahapan Dalam Kebijakan Publik	25
2.3. Pelaksanaan Kebijakan Publik	26
F. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Masalah	27
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Populasi dan Penentuan Sampel	29
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	31
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	34
1. Pengertian Asuransi	34
2. Syarat-Syarat Perjanjian Asuransi	35
3. Asuransi Kesehatan	39
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan	
Sosial (BPJS)	40
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	40

2. Fungsi dan Wewenang BPJS	41
C. Mekanisme dan Tata Cara Rujukan	43
D. Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kegawatdaeruran	
Obstetri dan Neonata.	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Implementasi Kebijakan Perlindungan Kesehatan Masyarakat..	
Melalui Jaminan Perlindungan Kesehatan (JPK)	56
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011	
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	57
1.1. Implementasi Program BPJS di Kabupaten Pati	59
1.2. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	60
2. Asuransi Kesehatan	64
3. Prosedur Rujukan Dengan menggunakan Kartu BPJS	65
3.1. Tata Cara Pelaksanaan Sistem Rujukan Pasien Peserta .	
BPJS	68
3.2. Prosedur Standar Menerima Rujukan Pasien	69
4. Upaya Rumah Sakit Islam Pati Mengimplementasikan	
Perlindungan Kesehatan Melalui Program JPK	70
B. SOP Yang Diterapkan Untuk Mewujudkan Perlindungan	
Kesehatan Masyarakat Melalui JPK	74
C. Kendala-Kendala Dalam Mengimplementasikan Perlindungan	
Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Program JPK	80

BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

